BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebanyak 30 tahun selama periode tahun 1982-2011 dari data Hasil Realisasi Keuangan Negara Tahunan. Sebelum membahas pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dan implikasinya terhadap pengeluaran pemerintah, terlebih dahulu akan dibahas perkembangan inflasi, penerimaan pajak pertambahan nilai, dan pengeluaran pemerintah selama periode 1982-2011. Data yang digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini berupa data sekunder, karena merupakan data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dan telah mengalami pengolahan dalam bentuk Laporan Tahunan Keuangan Negara.

4.1.1.1 Perkembangan Laju Inflasi di Indonesia

Pada dasarnya banyak data statistik ekonomi yang dapat dijadikan indikator untuk memperlihatkan laju inflasi, diantaranya adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Di Indonesia IHK dihitung berdasarkan perkembangan harga di 17 ibu kota propinsi yang mencakup 150 jenis barang dan jasa dengan dasar perhitungan tahun 1983 sampai tahun 1996, sedangkan untuk tahun 1996 sampai sekarang IHK dihitung berdasarkan perkembangan harga di 43 kota yang mencakup 225 jenis barang dan jasa. Oleh karena itu perubahan harga di luar jenis

barang dan jasa tersebut dari 17 kota (1983) atau 43 kota (1996) tidak dapat mempengaruhi laju inflasi nasional (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, 2007:24).

Dornbusch & Fischer (1993) menggolongkan tingkat inflasi rata-rata di Indonesia dekade 1970-an dan 1980-an dalam rentang moderat (15% s.d. 30%). Padahal sebelum itu (1960-an) inflasi berada di ambang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang dekade 1960-an, inflasi rata-rata sebesar 196,08% dengan tingkat paling parah terjadi tahun 1966 (635,35%). Hanya pada tahun 1969 saja inflasi berada pada level rendah (9,89%).

Untuk melihat perkembangan laju inflasi dan indeks harga konsumen di Indonesia tahun 1982-2011 dapat di lihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 4.1
Tingkat Inflasi (%) Berdasarkan IHK 1982-2011

Tahun	Laju Inflasi (%)	IHK (%)	Tahun	Laju Inflasi (%)	IHK (%)
1982	9,69	192,09	1997	11,05	198,22
1983	11,46	214,74	1998	77,63	168,32
1984	8,76	237,19	1999	2,01	202,63
1985	4,31	248,40	2000	9,35	210,27
1986	8,83	262,88	2001	12,55	234,46
1987	8,90	287,27	2002	10,03	262,31
1988	5,47	310,37	2003	5,06	279,59
1989	5,97	330,29	2004	6,40	113,25
1990	9,53	112,48	2005	17,11	125,09
1991	9,52	123,02	2006	6,60	141,48
1992	4,94	132,25	2007	6,59	150,55
1993	9,77	145,07	2008	11,06	109,78
1994	9,24	157,42	2009	2,78	115,06
1995	8,64	172,27	2010	6,96	120,97
1996	6,47	185,92	2011	3,79	126,13

Sumber : Statistik Indonesia (BPS), diolah

Dari tabel tersebut perkembangan laju inflasi dan indeks harga konsumen (IHK) di Indonesia tahun 1982-2011 dapat di lihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Laju Perkembangan Inflasi (IHK) dari Tahun 1982-2011

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Pada tahun 1982 inflasi mencapai 9,69 dan mengalami kenaikan sebesar 11,46 di tahun 1983. Pada tahun 1984 sampai 1996 laju inflasi dapat dikendalikan pada level satu digit, dimana pada kurun waktu 1982–1997 ini inflasi tertinggi terjadi tahun 1983 (11,46%) dan terendah pada tahun 1985 (4,31%). Pada tahun 1992 laju inflasi nasional yang terjadi adalah sebesar 4,94 persen. Dengan IHK sebesar 132,25 persen. Pada tahun 1993 laju inflasi meningkat menjadi sebesar 9,77 persen dengan IHK yang meningkat menjadi sebesar 145,07 persen. Dan pada tahun berikutnya laju inflasi dan IHK mengalami fluktuasi yang di akibat karena kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil.

Pada tahun 1998 laju inflasi di Indonesia meningkat drastis menjadi sebesar 77,63 persen dengan IHK yang meningkat juga sebesar 168,32 persen

yang di akibatkan oleh terjadinya krisis ekonomi moneter atau yang lebih dikenal krismon yang melanda Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lainnya yang menyebabkan anjloknya mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing yaitu USD. Dengan terjadinya krisis moneter menyebabkan harga-harga barang meningkat drastis sehingga mengurangi daya beli masyarakat dan berimbas kapada para pengusaha karena barang produksinya tidak habis di pasar sehingga para pengusaha harus mengurangi hasil produksi dan banyak para tenaga kerja yang harus dipeberhentikan dan ada juga perusahaan yang mengalami gulung tikar. Untuk mencegah inflasi yang sangat drastis maka pemerintah mulai melakukan pengontrolan dan pengetatan terhadap harga-harga barang dan jasa yang ada di pasar.

Pada tahun-tahun berikutnya laju inflasi dan IHK di Indonesia mengalami fluktuasi karena belum stabilnya perekonomian walaupun sudah berganti kepemimpinan presiden, dari masa orde baru ke masa reformasi. Adapun pada tahun tersebut perekonomian masih sering bergejolaak seperti nilai tukar rupiah yang tidak stabil dan terjadinya kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dan pada tahun 2008 laju inflasi sebesar 11,06 persen dengan IHK 109,78 persen. Semua ini diakibatkan oleh terjadinya krisis finansial yang melanda Amerika Serikat sehingga berdampak bagi negara-negara sedang berkembang di Indonesia dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami gulung tikar. Krisis ekonomi ini lebih dikenal dengan nama krisis ekonomi global. Pasca krisis moneter, perekonomian Indonesia mulai mengalami perbaikan, sehingga antara tahun 1998

dan 2009 laju inflasi kembali dapat dikendalikan oleh pemerintah melalui berbagai instrumen kebijakan.

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dalam mengambil keputusan melakukan konsumsi, investasi dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

Krisis moneter yang melanda negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter menyebabkan terjadinya imported inflation sebagai akibat dari terdepresiasinya secara tajam nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, yang selanjutnya mengakibatkan tekanan inflasi yang berat bagi Indonesia.

Fenomena inflasi di Indonesia sebenarnya semata-mata bukan merupakan suatu fenomena jangka pendek saja dan yang terjadi secara situasional, tetapi seperti halnya yang umum terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang lainnya, masalah inflasi di Indonesia lebih pada masalah inflasi jangka panjang karena masih terdapatnya hambatan-hambatan struktural dalam perekonomian negara. Dengan demikian, maka pembenahan masalah inflasi di Indonesia tidak

cukup dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter saja, yang umumnya bersifat jangka pendek, tetapi juga dengan melakukan pembenahan di sektor riil, yaitu dengan target utama mengeliminasi hambatan-hambatan struktural yang ada dalam perekonomian nasional. Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai "penyakit" ekonomi makro yang meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat.

Menjelang akhir pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada single digit, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar prosentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi. Lebih-lebih setelah semakin berlanjutnya krisis moneter yang kemudian diikuti oleh krisis ekonomi, yang menjadi salah satu dari penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru, angka inflasi cenderung meningkat pesat (mencapai lebih dari 75 % pada tahun 1998), dan diperparah dengan semakin besarnya presentase golongan masyarakat miskin. Sehingga bisa dikatakan, bahwa meskipun angka inflasi di Indonesia termasuk dalam katagori tinggi, tetapi dengan meninjau presentase golongan masyarakat ekonomi bawah yang menderita akibat inflasi cukup besar, maka sebenarnya dapat dikatakan bahwa inflasi di Indonesia telah masuk dalam stadium awal dari *hyperinflation*.

Sebagaimana halnya yang umum terjadi pada negara-negara berkembang, inflasi di Indonesia relatif lebih banyak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural ekonomi bila dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat *monetary*

policies. Sehingga bisa dikatakan, bahwa pengaruh dari *cosh push inflation* lebih besar dari pada *demand pull inflation*. Memang dalam periode tahun-tahun tertentu, misalnya pada saat terjadinya *oil booming*, tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang beredar. Tetapi hal tersebut tidak dapat mengabaikan adanya pengaruh yang bersifat struktural ekonomi, sebab pada periode tersebut, masih terjadi kesenjangan antara penawaran agregat dengan permintaan agregat, contohnya di sub sektor pertanian, yang dapat meningkatkan derajat inflasi.

Pada umumnya pemerintah Indonesia lebih banyak menggunakan pendekatan moneter dalam upaya mengendalikan tingkat harga umum. Pemerintah Indonesia lebih senang menggunakan instrumen moneter sebagai alat untuk meredam inflasi, misalnya dengan *open market mechanism* atau *reserve requirement*. Tetapi perlu diingat, bahwa pendekatan moneter lebih banyak dipakai untuk mengatasi inflasi dalam jangka pendek, dan sangat baik diterapkan pada negara-negara yang telah maju perekonomiannya, bukan pada negara berkembang yang masih memiliki *structural bottleneck*. Jadi, apabila pendekatan moneter ini dipakai sebagai alat utama dalam mengendalikan inflasi di negara berkembang, maka tidak akan dapat menyelesaikan masalah inflasi di negara berkembang yang umumnya berkarakteristik jangka panjang. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia pada saat krisis moneter yang selanjutnya menjadi krisis ekonomi, inflasi di Indonesia dipicu oleh kenaikan harga komoditi impor (*imported inflation*) dan membengkaknya hutang luar negeri akibat dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dan mata uang asing

lainnya. Akibatnya, untuk mengendalikan tekanan inflasi, maka terlebih dahulu harus dilakukan penstabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, khususnya dolar Amerika.

Dalam menstabilkan nilai kurs, pemerintah Indonesia cenderung lebih banyak memainkan instrumen moneter melalui otoritas moneter dengan *tight money policy* yang diharapkan selain dapat menarik minat para pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia melalui deposito, juga dapat menstabilkan tingkat harga umum. *Tight money policy* yang dilakukan dengan cara menaikkan tingkat suku bunga SBI (melalui *open market mechanism*) sangat tinggi, pada satu sisi akan efektif untuk mengurangi *money suplly*, tetapi di sisi lain akan meningkatkan suku bunga kredit untuk sektor riil. Akibatnya, akan menyebabkan timbulnya *cost push inflation* karena adanya *interest rate-price spiral*. Apabila tingkat suku bunga (deposito) perbankan sudah terlalu tinggi, sehingga dana produktif (dana untuk berproduksi atau berusaha) yang ada di masyarakat ikut terserap ke perbankan, maka akan dapat menyebabkan timbulnya stagnasi atau bahkan penurunan output produksi nasional (disebut dengan *Cavallo effect*). Lebih lagi bila sampai terjadi *negative spread* pada dunia perbankan nasional, maka bukan saja menimbulkan kerusakan pada sektor riil, tetapi juga kerusakan pada industri perbankan nasional (sektor moneter). Jika kebijaksanaan ini terus dilakukan oleh pemerintah dalam jangka waktu menengah atau panjang, maka akan terjadi depresi ekonomi, akibatnya struktur perekonomian nasional akan rusak. Jika demikian halnya, maka sebaiknya kebijaksanaan pengendalian inflasi bukan hanya dilakukan melalui konsep kaum moneterist saja, tetapi juga

dengan memperhatikan cara pandang kaum strukturalist, yang lebih memandang perlunya mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada. Dengan berpedoman pada berbagai hambatan dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang telah disebutkan di atas, maka perlu berbagai upaya pembenahan.

4.1.1.2 Perkembangan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Penerimaan perpajakan di Indonesia terdiri dari 7 jenis, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Cukai, Pajak Bumi dan bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB), Pajak Ekspor dan Pajak tidak Langsung Lainnya (PTLL). Tabel 4.2 menunjukkan penerimaan pajak per jenis pajak. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan pemerintah adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Tabel 4.2
Perkembangan Penerimaan Pajak Per Jenis Pajak Tahun 1982/2011
(Dalam Milyar)

Tahun	PPN	PPh	Bea Masuk	Cukai	Pajak Ekspor	PBB	TTL	Jumlah
1982	476.6	1859.3	3950.6	738.8	67	132	98	2239.50
1983	575.2	1968,2	439.4	784.6	83	145	110	2992.80
1984	878	2042.4	541.3	873.8	91	157	138	4721.50
1985	2227	2070.9	674.3	879.9	51	167	207	6277.10
1986	2900	2602.7	1269.3	1002.6	79	190	190	8233.60
1987	3390	2876.2	1441.5	1105.4	184	275	223	9495.10
1988	4505	4432.3	1376.1	1410.4	156	424	292	12595.80
1989	5837	5754.8	1892.2	1482.2	171	590	276	16003.20
1990	7463	8250	2799.8	1799.8	44	811	243	21410.60
1991	8926	9727	2871.1	1915	19	875	303	24636.10
1992	10742	12516.3	3223.3	2241.6	8	1101	360	30192.20
1993	13944	14758.9	3555.3	2625.8	14	1534	285	36717.00

1994	14087	18764.1	3900.1	3153	131	1647	302	41984.20
1995	18350	21012	3029.4	3592.7	186	1894	453	48517.10
1996	20351	25495.1	2807.1	4216.7	81	2413	591	55954.90
1997	25199	29117.7	3321.7	4436.3	129	2641	478	65322.70
1998	28386	49297	2218	7974	4582	3163	462	96082.00
1999	32982	54941	3748	10339	835	365	569	103779.00
2000	35000	57073	6697	11287	331	4456	837	115681.00
2001	55900	94576	9026	17394	541	6663	1384	185484.00
2002	65200	101873	10344	23189	231	7828	1469	210134.00
2003	76800	114832	10847	26396	230	10907	1654	241666.00
2004	87500	133300	12700	29200	300	14700	3400	281100.00
2005	101295	175380	14921	33256	316	16184	2051	343403.00
2006	132876	213698	13563	38522	1244	18154	2590	420647.00
2007	152057	251748	14418	42035	3042	22026	2720	488046.00
2008	209647	318028	19800	46968	14858	25526	3325	638152.00
2009	193068	317498	18150	56718	565	24270	3116	613385.00
2010	230605	357045	20017	66166	8898	28581	3969	715281.00
2011	298441	431977	21501	68075	25439	29058	4194	878685.00

Sumber : Statistik Indonesia (BPS), diolah

Dari tabel 4.2 diatas terlihat bahwa jumlah penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Kenaikan dari sektor perpajakan ini telah menyebabkan penerimaan dalam negeri semakin tangguh, karena sedikit demi sedikit telah mampu melepaskan ketergantungannya pada minyak bumi dan gas alam. Namun demikian penerimaan dari sektor minyak masih merupakan sumber dana yang penting, disamping sebagai penyumbang devisa yang besar yang diperlukan bagi pembangunan. Harga minyak yang turun drastis dalam tahun 1986/1987, berangsur-angsur telah membaik walaupun begitu menggembirakan (Nota Keuangan dan RAPBN,1988).

Sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2011 penerimaan pajak memberi kontribusi rata-rata lebih dari 50%, salah satu dari penerimaan pajak tersebut

adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN di Indonesia dipungut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM). Walaupun demikian sistem PPN dan PPnBM tersebut baru berlaku mulai tanggal 1 April 1985. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan PP No. 28 Tahun 1988 tentang perluasan objek pengenaan PPN samapai tingkat pengecer berskala besar. Sampai saat ini PPN mempunyai tarif sebesar 10 persen untuk seluruh komoditi kena pajak, kecuali apabila komoditi tersebut diekspor. Untuk komoditi yang diekspor dikenakan tarif PPN nol persen. Pengenaan tarif nol persen untuk komoditi-komoditi yang diekspor dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor non migas. Untuk barang-barang mewah disamping dikenakan PPN sebesar 10 persen juga dikenakan PPnBM dengan tarif sebesar 10, 20, 30 atau 35 persen tergantung dari jenis barang mewahnya (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992).

Penerimaan PPN/PPnBM Secara nominal selalu mengalami kenaikan sejak diterapkannya reformasi pepajakan tahun 2004. Penerimaan nominal ini dapat dilihat sebagai target penerimaan PPN. Dari tabel diatas terlihat bahwa penerimaan PPN selalu mengalami kenaikan dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2008 ini menunjukkan bahwa, penerimaan PPN memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memberikan kontribusi rata-rata sekitar lebih dari 18%. Pada tahun 2009 penerimaan PPN turun, Penurunan penerimaan PPN tersebut, disebabkan karena buruknya kinerja administrasi penarikan pajak. Dampak negatif dari krisis

ekonomi dunia terhadap Indonesia dipastikan mengakibatkan penerimaan pajak mengalami *sortfall* (penerimaan di bawah target).

Dalam Nota keuangan dan RAPBN dikemukakan lebih lanjut bahwa penerimaan pajak khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari angkat tax rasio yaitu rasio penerimaan pajak terhadap PDB yang masih relative rendah. Pada masa krisis yang berlangsung selama tahun 1988, penerimaan pajak tidak terlalu menggembirakan. Hal itu berkaitan dengan melemahnya pertumbuhan sektor swasta dan dunia usaha, yang pada gilirannya berpengaruh pada penurunan kontribusi sektor tersebut pada penerimaan perpajakan. Dalam kondisi normal, penerimaan pajak berhubungan erat dengan beberapa variable makro, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, perkembangan harga (inflasi), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun dilain pihak kemerosotan bidang ekonomi, telah memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan bagi hamper semua jenis pajak pada tahun 1988-2000.

Walaupun penerimaan PPN/PPnBM secara nominal mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, tetapi secara riil pernah mengalami penurunan. Pada tahun 1998, Penerimaan PPN/PPnBm secara riil mengalami penurunan sebesar -16,75% pada tahun 1998, penurunan penerimaan riil ini terjadi karena adanya krisis yang melanda perekonomian Indonesia dimana tingkat inflasi mencapai 77,63%. Hal ini perlu dikaji, karena menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PPN/PPnBM cenderung mengalami penurunan juga (Nota Keuangan RAPBN).

4.1.1.3 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Musgrave dan *Rostow* menyatakan perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya. *Wagner* menyatakan berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut.

Hal ini juga dialami oleh Indonesia dimana baik nominal maupun riil dari total pengeluyaran pemerintah terus meningkat sepanjang tahun. Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, yaitu pengeluaran pemerintah riil berdasarkan harga konstan tahun 2000. Adapun perkembangan pengeluaran pemerintah dalam 30 tahun terakhir dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3
Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1982-2011 Berdasarkan Harga Konstan (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Growth (%)	Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Growth (%)
Th 1982	14,355.90	8.34	Th 1997	127,969.00	0.29
Th 1983	18,311.00	-2.30	Th 1998	215,586.00	-15.37
Th 1984	19,380.80	4.30	Th 1999	245,192.00	1.60
Th 1985	22,824.00	7.62	Th 2000	187,100.00	5.71
Th 1986	21,891.00	2.74	Th 2001	260,500.00	9.29
Th 1987	26,958.00	-5.81	Th 2002	224,000.00	0.49
Th 1988	32,990.00	7.33	Th 2003	258,100.00	9.96
Th 1989	38,165.00	10.37	Th 2004	306,100.00	3.99
Th 1990	46,654.00	3.32	Th 2005	358,903.00	8.06
Th 1991	51,992.00	7.07	Th 2006	478,249.00	8.16
Th 1992	58,166.00	5.86	Th 2007	504,623.00	3.89
Th 1993	68,718.00	-2.32	Th 2008	693,356.00	10.43
Th 1994	72,342.00	0.52	Th 2009	628,812.00	15.71
Th 1995	82,353.00	3.40	Th 2010	697,406.00	6.60
Th 1996	98,531.00	0.49	Th 2011	908,243.00	6.50

Sumber : Statistik Indonesia, (BPS), Data Diolah

Tabel 4.3 memperlihatkan perkembangan pengeluaran pemerintah Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Pengeluaran pemerintah ini mencangkup konsumsi pemerintah untuk barang dan jasa. Apabila dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan Product Domestic Bruto (PDB) Indonesia, pengeluaran pemerintah hanya berkontribusi sekitar 10%. Ini berbanding terbalik dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 60-70% dalam pembentukan Product Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Kontribusi tertinggi dari pengeluaran pemerintah dengan nilai 13% dari total Product Domestik Bruto (PDB). Untuk tahun-tahun selanjutnya kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap Product Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 7-11%. Perkembangan pengeluaran pemerintah pada tahun 1982 sampai dengan 2011 juga dapat dilihat dalam Gambar 4.2 sebagai berikut :

Gambar 4.2
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Indonesia tahun 1982-2011

Sumber : Statistik Indonesia, BPS (Data Diolah)

Gambar 4.2 menunjukkan pertumbuhan pengeluaran pemerintah Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dari gambar 4.2 tersebut terlihat penurunan yang cenderung tajam yaitu pada tahun 1998. Tahun 1998 terjadi penurunan sebesar 15,37%. Penurunan ini tidak disertai dengan penurunan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pembentukan Product Domestik Bruto (PDB) riil. Penurunan ini terjadi karena dampak dari krisis yang berlangsung pada tahun sebelumnya, sehingga pemerintah harus mengurangi pengeluarannya, khususnya belanja pegawai. Peningkatan untuk pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 1986 adalah lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan dalam tahun 1985. Meningkatnya pengeluaran pemerintah ini berkaitan erat dengan naiknya pengeluaran untuk belanja pegawai (Nota Keuangan dan RAPBN, 1987)

4.1.1.4 Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Salah satu indikator penting dalam ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi adalah inflasi. Pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa serta peran kebijaksanaan pemerintah, bahkan lebih luas lagi berkaitan dengan perilaku sektor moneter. Untuk mengendalikan inflasi perlu perpaduan dan kerjasama yang harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Inflasi dalam Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy) dapat dijelaskan hubungannya, dimana pemerintah menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian, dimana salah satu tujuan pemerintah dalam Kebijakan Fiskal adalah untuk menurunkan inflasi. Untuk menstabilkan perekonomian pemerintah memakai salah satu perangkat yaitu perpajakan. Tujuan dari Kebijakan Fiskal yaitu untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, serta untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.

Inflasi akan mengurangi daya beli uang yang telah diperoleh masyarakat dengan susah payah. Apabila harga naik, tiap lembar uang yang dihasilkannya hanya akan mampu membeli barang dan jasa dalam jumlah yang sedikit yang akhirnya akan menurunkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu solusi bagi masalah ini daripada menghilangkan inflasi adalah menyusun

daftar sistem pajak, artinya hukum pajak dapat ditulis ulang untuk memperhitungkan dampak inflasi. Pada dunia yang ideal, hukum pajak akan ditulis dalam rangka mencegah inflasi mengubah tanggupan pajak riil seseorang.

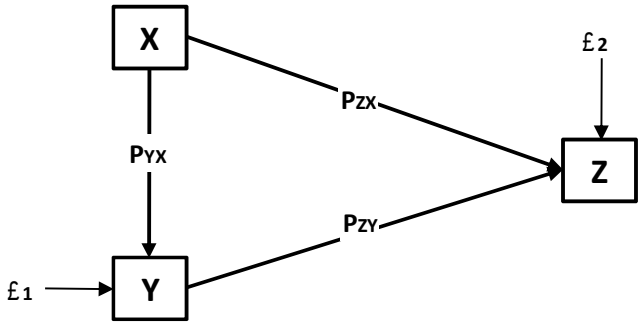
4.1.1.5 Pengaruh Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya Gross National Product (GNP) akan menyebabkan penerimaan pemerintah akan semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah akan semakin besar.

Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

4.1.2 Analisis Verifikatif

Pada bagian ini akan diuji pengaruh inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah dengan menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Pengujian akan dilakukan dua tahap, dimana pada tahap pertama akan diuji pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai , kemudian pada tahap kedua akan diuji pengaruh inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengeluaran pemerintah. Secara diagram bentuk hubungan antara ketiga variabel yang sedang diteliti tersebut dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut :



Gambar 4.3 Model Analisis Jalur

Gambar 4.3 seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam dua bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{Y = P_{YX}X + £_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + £_2}$$

Keterangan:

X = Inflasi
Y = Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Z = Pengeluaran Pemerintah
P_{XY} = Koefisien jalur Inflasi terhadap Penerimaan PPN
P_{ZX} = Koefisien jalur Inflasi terhadap Pengeluaran pemerintah
P_{ZY} = Koefisien jalur Penerimaan PPN terhadap Pengeluaran Pemerintah
ε = Pengaruh faktor lain

Dari data masing-masing variabel yang terkumpul, dibuat rekap data untuk perhitungan analisis jalur sebagai berikut:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Data Interval Untuk Perhitungan Analisis Jalur

n	X	Y	Z	X^2	Y^2
1	192.09	476.60	14,355.90	36,898.57	227,147.56
2	214.74	575.20	18,311.00	46,113.27	330,855.04
3	237.19	878.00	19,380.80	56,259.10	770,884.00
4	248.40	2,227.00	22,824.00	61,702.56	4,959,529.00
5	262.88	2,900.00	21,891.00	69,105.89	8,410,000.00
6	287.27	3,390.00	26,958.00	82,524.05	11,492,100.00
7	310.37	4,505.00	32,990.00	96,329.54	20,295,025.00
8	330.29	5,837.00	38,165.00	109,091.48	34,070,569.00
9	112.48	7,463.00	46,654.00	12,651.75	55,696,369.00
10	123.02	8,926.00	51,992.00	15,133.92	79,673,476.00
11	132.25	10,742.00	58,166.00	17,490.06	115,390,564.00
12	145.07	13,944.00	68,718.00	21,045.30	194,435,136.00
13	157.42	14,087.00	72,342.00	24,781.06	198,443,569.00
14	172.27	18,350.00	82,353.00	29,676.95	336,722,500.00
15	185.92	20,351.00	98,531.00	34,566.25	414,163,201.00
16	198.22	25,199.00	127,969.00	39,291.17	634,989,601.00
17	168.32	28,386.00	215,586.00	28,331.62	805,764,996.00
18	202.63	32,982.00	245,192.00	41,058.92	1,087,812,324.00
19	210.27	35,000.00	187,100.00	44,213.47	1,225,000,000.00
20	234.46	55,900.00	260,500.00	54,971.49	3,124,810,000.00
21	262.31	65,200.00	224,000.00	68,806.54	4,251,040,000.00
22	279.59	76,800.00	258,100.00	78,170.57	5,898,240,000.00
23	113.25	87,500.00	306,100.00	12,825.56	7,656,250,000.00
24	125.09	101,295.00	358,903.00	15,647.51	10,260,677,025.00
25	141.48	132,876.00	478,249.00	20,016.59	17,656,031,376.00
26	150.55	152,057.00	504,623.00	22,665.30	23,121,331,249.00
27	109.78	209,647.00	693,356.00	12,051.65	43,951,864,609.00
28	115.06	193,068.00	628,812.00	13,238.80	37,275,252,624.00
29	120.97	230,605.00	697,406.00	14,633.74	53,178,666,025.00
30	126.13	298,441.00	908,243.00	15,908.78	89,067,030,481.00
∑	**5,669.77**	**1,839,607.80**	**6,767,770.70**	**1,195,201.46**	**300,669,841,234.60**

Tabel 4.5
Hasil Perkalian Rekapitulasi Data Untuk Perhitungan Analisis Jalur

n	Z^2	X.Y	X.Z	Y.Z
1	206,091,864.81	91,550.09	2,757,624.83	6,842,021.94
2	335,292,721.00	123,518.45	3,932,104.14	10,532,487.20
3	375,615,408.64	208,252.82	4,596,931.95	17,016,342.40
4	520,934,976.00	553,186.80	5,669,481.60	50,829,048.00
5	479,215,881.00	762,352.00	5,754,706.08	63,483,900.00
6	726,733,764.00	973,845.30	7,744,224.66	91,387,620.00
7	1,088,340,100.00	1,398,216.85	10,239,106.30	148,619,950.00
8	1,456,567,225.00	1,927,902.73	12,605,517.85	222,769,105.00
9	2,176,595,716.00	839,438.24	5,247,641.92	348,178,802.00
10	2,703,168,064.00	1,098,076.52	6,396,055.84	464,080,592.00
11	3,383,283,556.00	1,420,629.50	7,692,453.50	624,819,172.00
12	4,722,163,524.00	2,022,856.08	9,968,920.26	958,203,792.00
13	5,233,364,964.00	2,217,575.54	11,388,077.64	1,019,081,754.00
14	6,782,016,609.00	3,161,154.50	14,186,951.31	1,511,177,550.00
15	9,708,357,961.00	3,783,657.92	18,318,883.52	2,005,204,381.00
16	16,376,064,961.00	4,994,945.78	25,366,015.18	3,224,690,831.00
17	46,477,323,396.00	4,777,931.52	36,287,435.52	6,119,624,196.00
18	60,119,116,864.00	6,683,142.66	49,683,254.96	8,086,922,544.00
19	35,006,410,000.00	7,359,450.00	39,341,517.00	6,548,500,000.00
20	67,860,250,000.00	13,106,314.00	61,076,830.00	14,561,950,000.00
21	50,176,000,000.00	17,102,612.00	58,757,440.00	14,604,800,000.00
22	66,615,610,000.00	21,472,512.00	72,162,179.00	19,822,080,000.00
23	93,697,210,000.00	9,909,375.00	34,665,825.00	26,783,750,000.00
24	128,811,363,409.00	12,670,991.55	44,895,176.27	36,355,079,385.00
25	228,722,106,001.00	18,799,296.48	67,662,668.52	63,547,814,124.00
26	254,644,372,129.00	22,892,181.35	75,970,992.65	76,731,459,511.00
27	480,742,542,736.00	23,015,047.66	76,116,621.68	145,360,005,332.00
28	395,404,531,344.00	22,214,404.08	72,351,108.72	121,403,475,216.00
29	486,375,128,836.00	27,896,286.85	84,365,203.82	160,825,310,630.00
30	824,905,347,049.00	37,642,363.33	114,556,689.59	271,056,949,163.00
∑	**3,275,831,119,059.45**	**271,119,067.60**	**1,039,757,639.31**	**982,574,637,449.54**

Sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan, selanjutnya data akan diuji dengan menggunakan analisis jalur *(path analysis).* Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen. Hasil komputasi analisis jalur menggunakan bantuan *software SPSS 17* dapat dilihat pada lampiran. Untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan

antar sesama variabel independen, maka nilai koefisien korelasi yang diperoleh dikonsultasikan ke tabel interpretasi koefisien korelasi berikut:

Tabel 4.6
Tabel Tingkat Keeratan Korelasi

0 - 0.20	Sangat rendah (hampir tidak ada hubungan)
0.21 - 0.40	Korelasi yang lemah
0.41 - 0.60	Korelasi sedang
0.61 - 0.80	Cukup tinggi
0.81 - 1.00	Korelasi tinggi

Sumber: ***Syahri Alhusin dalam Umi Narimawati (2010:50)***

4.1.2.1 Korelasi Antar Variabel

Berdasarkan hasil pengolahan data inflasi, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengeluaran pemerintah di tahun 1982/2011 dengan menggunakan *software* SPSS 17 *for Windows* diperoleh koefisien korelasi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.7
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		IHK	Penerimaan PPN	Pengeluaran Pemerintah
IHK	Pearson Correlation	1	**-.502****	**-.515****
	Sig. (1-tailed)		.002	.002
	N	30	30	30
Penerimaan PPN	Pearson Correlation	**-.502****	1	**.990****
	Sig. (1-tailed)	.002		.000
	N	30	30	30
Pengeluaran Pemerintah	Pearson Correlation	**-.515****	**.990****	1
	Sig. (1-tailed)	.002	.000	
	N	30	30	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Koefisien korelasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan software *SPSS 17 for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar -0,502 artinya hubungan korelasi antara inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat kurang. Koefisien korelasi bertanda negatif menunjukkan hubungan inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak searah, artinya jika inflasi tinggi maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berkurang. Adapun tingkat signifikasinya adalah 0,000 yang artinya pengaruh tersebut signifikan karena < 0,05. Kesimpulannya adalah korelasi antara inflasi dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai berkurang dan signifikan.
b. Berdasarkan hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan software *SPSS 17 for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara inflasi dengan pengeluaran pemerintah sebesar -0,515 artinya hubungan antara inflasi dengan pengeluaran pemerintah sangat kurang. Koefisien korelasi bertanda negatif menunjukkan hubungan antara inflasi dengan pengeluaran pemerintah tidak searah, artinya jika inflasi tinggi maka pengeluaran pemerintah menurun. Adapun tingkat signifikasinya adalah 0,000 yang artinya pengaruh tersebut signifikan karena < 0,05. Kesimpulannya adalah korelasi antara inflasi dengan pengeluaran pemerintah berkurang dan signifikan.

c. Berdasarkan hasil perhitungan manual dan output dari pengolahan data menggunakan software *SPSS 17 for windows* diperoleh nilai koefisien korelasi antara penerimaan pajak pertambahan Nilai (PPN) dengan pengeluaran pemerintah sebesar 0,990 artinya hubungan antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pengeluaran pemerintah sangat tinggi. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan hubungan antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pengeluaran pemerintah searah, artinya jika penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tinggi maka pengeluaran pemerintah akan tinggi pula. Adapun tingkat signifikasinya adalah 0,000 yang artinya pengaruh tersebutsignifikan karena < 0,05. Kesimpulannya adalah korelasi antara dividen kas dengan harga saham sangat tinggi dan signifikan.

4.1.2.2 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel inflasi berperan sebagai variabel independen (*eksogenus variable*) dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel dependen (*endogenus variable*). Selanjutnya untuk menguji pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (inflasi), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$$(P_{YX}) = r_{XY} = -0,502$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 17 for windows* diperoleh koefisien jalur inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut.

Tabel 4.8
Koefisien Jalur Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	178318.974	40203.718		4.435	.000
	IHK	-619.066	201.422	**-.502**	-3.073	.005

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Nilai *standardized coefficients* sebesar -0,502 pada tabel 4.8 merupakan nilai koefisien jalur inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Koefisien jalur adalah bobot pengaruh langsung variabel inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mengkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R_{XY}^2 = (P_{YX}{}^2) = (-0{,}502)^2$$

$$= \mathbf{0,252}$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software* SPSS 17 *for Windows* diperoleh koefisien determinasi inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

Tabel 4.9
Koefisien determinasi Inflasi Terhadap Penerimaan PPN

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.502[a]	**.252**	.226	70830.1396

a. Predictors: (Constant), IHK

b. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel penyebab terhadap variabel akibat. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi memberikan pengaruh sebesar 25,2% terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara sisanya sebesar 74,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti Pengusaha Kena Pajak(PKP) , Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga Deposito, dan Produk Domestik Regional bruto (PDRB) diluar inflasi antara penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dilain pihak jika Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pertumbuhan Ekonomi dan Suku Bunga Deposito meningkat maka akan menaikkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam kegiatan ekonomi secara garis besarnya dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit produksi memproduksi barang dan jasa, dan kegiatan memproduksi ini timbul pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat dapat membeli barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan investasi.

Gambar 4.4
Koefisien Jalur Sub-Struktur Pertama

4.1.2.3 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai variabel independen (*eksogenus variable*) dan pengeluaran pemerintah sebagai variabel dependen (*endogenus variable*).

1. Koefisien Jalur

Selanjutnya untuk menguji pengaruh inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun matriks korelasi antar variabel independen, dalam hal ini yang menjadi variabel independen adalah inflasi (X) dan penerimaan pajak Pertambahan Nilai (Y).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}000 & -0{,}502 \\ -0{,}502 & 1{,}000 \end{bmatrix} \end{array}$$

2) Menghitung invers dari matriks korelasi antara inflasi (X) dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y).

$$R^{-1} = \frac{1}{(1 \times 1) - (-0{,}502 \times -0{,}502)} \begin{bmatrix} 1 & 0{,}502 \\ 0{,}502 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^{-1} = \frac{1}{(1 \times 1) - (-0{,}502 \times -0{,}502)} \begin{bmatrix} 1 & 0{,}502 \\ 0{,}502 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^{-1} = \frac{1}{0{,}747996} \begin{bmatrix} 1 & 0{,}502 \\ 0{,}502 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^{-1} = 1{,}3369 \begin{bmatrix} 1 & 0{,}502 \\ 0{,}502 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}3369 \times 1 & 1{,}3369 \times (0{,}502) \\ 1{,}3369 \times (0{,}502) & 1{,}3369 \times 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Maka, invers dari matriks korelasi antara variabel inflasi (X) dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) adalah :

$$R^{-1} = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} X & Y \end{array} \\ \begin{bmatrix} 1{,}3369 & 0{,}6711 \\ 0{,}6711 & 1{,}3369 \end{bmatrix} \end{array}$$

3) Menyusun matriks korelasi antara variabel independen (inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai) dengan variable dependen (pengeluaran pemerintah).

$$R = \begin{array}{c} \\ X \\ Y \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} Z \end{array} \\ \begin{bmatrix} -0{,}515 \\ 0{,}990 \end{bmatrix} \end{array}$$

4) Selanjutnya untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi antara variabel independen terhadap matriks korelasi variabel penyebab dengan variabel dependen.

$$\begin{bmatrix} P_{ZX} \\ P_{ZY} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1{,}3369 & 0{,}6711 \\ 0{,}6711 & 1{,}3369 \end{bmatrix} x \begin{bmatrix} -0{,}515 \\ 0{,}990 \end{bmatrix}$$

$$F_{ZX} = (1{,}3369 \times (-0{,}515)) + (0{,}6711 \times 0{,}990)$$
$$F_{ZX} = -0{,}6885 + (0{,}6644)$$
$$P_{ZX} = \mathbf{-0{,}023}$$

$$F_{ZY} = (0{,}6711 \times (-0{,}515)) + (1{,}3369 \times 0{,}990)$$
$$P_{ZY} = (-0{,}3456) + 1{,}3235$$
$$P_{ZY} = \mathbf{0{,}979}$$

Maka diperoleh koefisien jalur untuk variabel inflasi sebesar -0,023 dan koefisien jalur variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,979. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software SPSS 17 for Windows* diperoleh koefisien jalur inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pengeluaran pemerintah sebagai berikut :

Tabel 4.10
Koefisien Jalur Pengaruh Inflasi dan Penerimaan PPN Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58891.345	26141.261		2.253	.033
	IHK	-86.731	116.074	**-.023**	-.747	.461
	Penerimaan PPN	2.986	.094	**.979**	31.706	.000

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Nilai *standardized coefficients* sebesar -0,023 dan 0,979 pada tabel 4.9 merupakan nilai koefisien jalur Inflasi dan Penerimaan Pajak Pemerintah terhadap Pengeluaran Pemerintah.

2. Koefisien Determinasi

Melalui koefisien jalur yang telah diperoleh, selanjutnya dihitung koefisien determinasi, yaitu besar kontribusi/pengaruh inflasi dan penerimaan Pajak pertambahan Nilai terhadap pengeluaran pemerintah secara bersama-sama. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel independen dengan pengeluaran pemerintah.

$$R^2_{Z(XY)} = [-0{,}023 \quad 0{,}979]\begin{bmatrix}-0{,}515\\0{,}990\end{bmatrix}$$

$$R^2_{Z(XY)} = (-0{,}023 \times (-0{,}515)) + (0{,}979 \times 0{,}990)$$

$$R^2_{Z(XY)} = 0{,}011845 + 0{,}96921$$

$$R^2_{Z(XY)} = \mathbf{0{,}981}$$

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan *software SPSS 17 for Windows* diperoleh koefisien determinasi inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi Inflasi dan Penerimaan PPN Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990[a]	**.981**	.979	35295.7830

a. Predictors: (Constant), Penerimaan PPN, IHK

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Melalui nilai koefisien determinasi (R *Square*) dapat diketahui bahwa secara bersama-sama inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi (pengaruh) yang sangat besar yaitu sebesar 98,1% terhadap pengeluaran pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar 1,9% merupakan pengaruh faktor lain seperti Pengusaha Kena Pajak(PKP) , Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga Deposito, Produk Domestik Regional bruto (PDRB), Jumlah Uang Beredar, Kurs, dan lain-lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti. Secara visual jalur dari variabel independen terhadap pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini :

Gambar 4.5
Koefisien Jalur Sub-Struktur Kedua

Melalui koefisien jalur tersebut selanjutnya dihitung besar pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen sebagai berikut:

Besar pengaruh Inflasi (X) terhadap pengeluaran pemerintah (Z) di Indonesia.

Pengaruh variabel X terhadap variabel Z :

Pengaruh X terhadap Z secara langsung	=	(-0,023) × (-0,023)	=	0,001
Pengaruh tidak langsung X terhadap Z	=	(-0,023) × (-0,502) × 0,979	=	0,011
Pengaruh Total			=	**0,012**

Maka total yang memberikan pengaruh inflasi (X) terhadap pengeluaran pemerintah (Z) adalah sebesar 1,2% dengan arah negatif. Artinya jumlah inflasi yang semakin meningkat cenderung akan menurunkan pengeluaran pemerintah.

Besar pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) terhadap pengeluaran pemerintah (Z) yaitu :

Pengaruh variabel Y terhadap variabel Z :

Pengaruh Y terhadap Z secara langsung	=	0,979 × 0,979	=	0,958
Pengaruh tidak langsung Y terhadap Z	=	0,979 × (-0,502) × (-0,023)	=	0,011
Pengaruh Total			=	**0,969**

Maka total yang memberikan pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah adalah sebesar 96,9% dengan arah positif. Artinya jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang semakin meningkat cenderung akan meningkatkan pula pengeluaran pemerintah.

4.1.2.4 Pengujian Hipotesis

Untuk membuktikan apakah inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah baik secara parsial maupun bersama-sama (simultan) maka dilakukan pengujian hipotesis.

1. Pengaruh Inflasi dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pengeluaran Pemerintah Secara Parsial

Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Nilai tabel yang digunakan sebagai nilai kritis pada uji parsial (uji t) sebesar 1,703 yang diperoleh dari tabel t pada α = 0,05 dan derajat bebas 27 untuk pengujian satu pihak. Nilai statistik uji t yang digunakan pada pengujian secara parsial untuk variabel inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.12
Uji t Untuk Variabel Inflasi
Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	178318.974	40203.718		4.435	.000
	IHK	-619.066	201.422	-.502	**-3.073**	.005

a. Dependent Variable: Penerimaan PPN

Sedangkan untuk pengujian secara parsial untuk variabel inflasi, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.13
Uji t Untuk Variabel Inflasi, Penerimaan PPN Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	58891.345	26141.261		2.253	.033
	IHK	-86.731	116.074	-.023	**-.747**	.461
	Penerimaan PPN	2.986	.094	.979	**31.706**	.000

a. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Nilai statistik uji t yang terdapat pada tabel 4.13 dan 4.14 selanjutnya akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} untuk menentukan apakah variabel yang sedang diuji berpengaruh signifikan atau tidak.

A. Pengujian Hipotesis Inflasi Secara Parsial Terhadap Penerimaan PPN

Untuk membuktikan apakah inflasi memiliki hubungan yang signifikan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut.

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \rho_{XY} = 0$	Menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
$H_i : \rho_{XY} \neq 0$	Menunjukan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat bebas (df= n-k-1) df= 30-2-1= 27, dimana nilai t_{tabel} pengujian satu arah sebesar 1,703

c) Mencari nilai t_{hitung}

$$t = r_{XY}\sqrt{\frac{n-2}{1-r_{X1X2}{}^2}}$$

$$t = -0{,}502\sqrt{\frac{30-2}{1-(-0{,}502)^2}}$$

$$t = -0{,}502\sqrt{\frac{28}{0{,}747996}}$$

$$t = -0{,}502\sqrt{37{,}4334}$$

$$t = -0{,}502 \times 6{,}1183$$

$$t = -\mathbf{3{,}07}\ (Hasil\ Pembulatan)$$

Melalui keluaran *software SPSS 17 for windows* seperti terlihat pada tabel 4.13 diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel inflasi sebesar -3,073.

d) Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$,maka H_0 ditolak (berpengaruh negatif)

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh negatif)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-3,073>-1,703), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_i diterima. Artinya Inflasi secara parsial

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_0 sebagai berikut :

Gambar 4.6
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji t
Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.7 diatas dapat dilihat bahwa H_0 ditolak, karena t_{hitung} sebesar -3,073 berada pada daerah penolakan H_0, yang berarti bahwa Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

f) Kesimpulan

Inflasi memberikan kontribusi/pengaruh secara parsial sebesar 25,2% terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

B. Pengujian Hipotesis Inflasi Secara Parsial Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Dihipotesiskan bahwa inflasi secara parsial berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah, untuk membuktikan dugaan tersebut dilakukan pengujian secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \rho_{YX1} = 0$	Menunjukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.
$H_i : \rho_{YX1} \neq 0$	Menunjukan bahwa inflasi berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat bebas (df= n-k-1) df= 30-2-1= 27, dimana nilai t_{tabel} pengujian satu arah sebesar 1,703.

c) Mencari nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{P_{YX1}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{YX1X2}) \times C_{ii}}{(n-k-1)}}}$$

$$t_{hitung} = \frac{-0{,}023}{\sqrt{\frac{(1 - 0{,}981) \times 1{,}3369}{(30-2-1)}}}$$

$$t_{hitung} = \frac{-0{,}023}{0{,}0306722}$$

$$t_{hitung} = \mathbf{-0{,}75}\ (Hasil\ Pembulatan)$$

Melalui keluaran *software SPSS 17 for windows* seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel Inflasi sebesar -0,747.

d) Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$,maka H_0 ditolak (berpengaruh negatif)

Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh negatif)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (-0,747<-1,703), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima H_0 sehingga H_i ditolak. Artinya inflasi secara parsial tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_0 sebagai berikut:

Gambar 4.7
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji t
Pengaruh Inflasi terhadap Pengeluaran Pemerintah

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.8 diatas dapat dilihat bahwa H_0 diterima, karena t_{hitung} sebesar -0,703 berada pada daerah penolakan H_0, yang berarti bahwa Inflasi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

f) Kesimpulan

Inflasi memberikan tidak memberikan kontribusi/pengaruh secara parsial terhadap pengeluaran pemerintah.

C. Pengujian Hipotesis Penerimaan PPN Secara Parsial Terhadap Pengeluaran Pemerintah

Dihipotesiskan bahwa penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara parsial berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah, untuk membuktikan dugaan tersebut dilakukan pengujian secara parsial dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \rho_{YX2} = 0$	Menunjukan bahwa penerimaan PPN tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.
$H_i : \rho_{YX2} \neq 0$	Menunjukan bahwa penerimaan PPN berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat bebas (df= n-k-1) df= 30-2-1= 27, dimana nilai t_{tabel} pengujian satu arah sebesar 1,703

c) Mencari nilai t_{hitung}

$$t_{hitung} = \frac{P_{YX2}}{\sqrt{\frac{(1 - R^2_{YX1X2}) \times C_{ii}}{(n-k-1)}}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}979}{\sqrt{\frac{(1 - 0{,}981) \times 1{,}3369}{(30-2-1)}}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}979}{0{,}0306722}$$

$$t_{hitung} = \mathbf{31{,}7}\ (Hasil\ Pembulatan)$$

Melalui keluaran *software SPSS 17 for windows* seperti terlihat pada tabel 4.14 diperoleh nilai t_{hitung} untuk variabel penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 31,706.

d) Menentukan daerah penerimaan penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan t_{hitung} terhadap t_{tabel} dengan ketentuan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$,maka H_0 ditolak (berpengaruh positif)

Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak berpengaruh positif)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} adalah $t_{hitung} > t_{tabel}$ (31,706> 1,703), sehingga pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak H_0 sehingga H_i diterima. Artinya penerimaan PPN secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran

pemerintah. Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_0 sebagai berikut :

Gambar 4.8
Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 Pada Uji t
Pengaruh penerimaan PPN terhadap Pengeluaran Pemerintah

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Pada gambar 4.9 diatas dapat dilihat bahwa H_0 ditolak, karena t_{hitung} sebesar 31,706 berada pada daerah penolakan H_0, yang berarti bahwa penerimaan PPN secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

f) Kesimpulan

Penerimaan PPN memberikan kontribusi/pengaruh secara parsial sebesar 96,9% terhadap pengeluaran pemerintah.

2. Pengaruh Inflasi dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pengeluaran Pemerintah Secara Simultan

Selanjutnya untuk menguji apakah inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara simultan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah, maka dilakukan pengujian hipotesis secara simultan yang dapat dilihat melalui tabel ANOVA hasil pengolahan *software SPSS 17 for windows*. Tahapan-tahapan pengujian hipotesis secara simultan adalah sebagai berikut :

a) Merumuskan hipotesis statistik

$H_0 : \rho_{ZXY} = 0$	Menunjukan bahwa inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.
$H_i : \rho_{ZXY} \neq 0$	Menunjukan bahwa inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara simultan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.

b) Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar α = 0,05 atau 5 % dengan derajat bebas (k; n-k-1) df= 2:27. Pada tabel F untuk df_1= 2, df_2=59 diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,354.

c) Mencari nilai F_{hitung}

Dengan bantuan *software SPSS 17 for windows*, diperoleh *output* untuk mendapatkan nilai dari F_{hitung} sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{(n-k-1)R^2_{ZXY}}{k(1-R^2_{ZXY})}$$

$$F_{hitung} = \frac{(30 - 2 - 1)\ 0{,}981}{2\ (1 - 0{,}981)}$$

$$F_{hitung} = \frac{26{,}159}{0{,}038}$$

$$F_{hitung} = \mathbf{688{,}4}\ (Hasil\ Pembulatan)$$

Hasil nilai perhitungan F_{hitung} antara pengaruh inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah secara simultan diperoleh hasi F_{hitung} = 688,4. Maka berdasarkan perhitungan dengan menggunakan *software SPSS 17 for windows* dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut dibawah ini :

Tabel 4.14

ANOVA Untuk Uji Pengaruh Inflasi dan Penerimaan PPN Terhadap Pengeluaran Pemerintah

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.715E12	2	8.577E11	**688.493**	.000[a]
	Residual	3.364E10	27	1.246E9		
	Total	1.749E12	29			

a. Predictors: (Constant), Penerimaan PPN, IHK

b. Dependent Variable: Pengeluaran Pemerintah

Pada tabel diatas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 688,493.

d) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan F_{hitung} terhadap F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut:

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Hasil yang diperoleh dari perbandingan F_{hitung} terhadap F_{tabel} adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ (688,493 > 3,354), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menolak H_0 dan menerima H_i yang berarti kedua variabel bebas, yaitu Inflasi dan Penerimaan Pajak Pertambahan nilai (PPN) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah. Selain itu peneliti juga melakukan pengujian dengan cara melihat nilai signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.12.

Dari tabel ANOVA diatas diperoleh nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansi adalah H_0 ditolak dan kesimpulannya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan uji hipotesis dapat digambarkan daerah penolakan dan penerimaan H_0 sebagai berikut :

Gambar 4.9
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Pada Uji F
Pengaruh Inflasi dan Penerimaan PPN terhadap Pengeluaran Pemerintah

e) Pengambilan keputusan hipotesis

Berdasarkan gambar 4.6 diatas dapat dilihat bahwa H_0 ditolak, karena F_{hitung} sebesar 688,493 berada pada daerah penolakan H_0, sehingga disimpulkan bahwa inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

f) Kesimpulan

inflasi dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memberikan kontribusi/pengaruh secara simultan sebesar 98,1% terhadap pengeluaran pemerintah.